

EVALUASI PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA SEBERANG PULAU BUSUK KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018

LASMAWATI

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: lasmaw22@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in SeberangPulauBusuk Village, InumanSubdistrict, KuantanSingingi Regency. The purpose of this study was to determine the Evaluation of the Village Head's Work Program in 2018 in the SeberangPulauBusuk Village, Inuman District, KuantanSingingi Regency. The formulation of the problem in this study is how to evaluate the work program of the Village Head in 2018 in the village of SeberangPulauBusuk, InumanSubdistrict, KuantanSingingi Regency. This type of research is Qualitative Descriptive with Purposive Sampling techniques by using informants, namely taking samples with certain criteria and requirements or intentionally. In this study, the informants were village heads, village secretaries, heads of affairs (Kaur), hamlet heads and 10 community members who knew clearly and how the Village Head Work Program in 2018 in SeberangPulauBusuk Village, Inuman District, KuantanSingingi District. Analysis of the data used is qualitative descriptive data analysis with Milles and Hubberman methods with data analysis methods with interactive models, namely the steps to reduce data, data presentation, inference and verification.

Keywords: Work Program Evaluation

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Kerja Kepala Desa tahun 2018 di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi program kerja Kepala Desa tahun 2018 di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan teknik Purposive Sampling dengan menggunakan informan yaitu mengambil sampel dengan kriteria dan persyaratan tertentu atau dengan secara sengaja. Dalam penelitian ini diambil sebagai informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Dusun dan 10 orang warga Masyarakat yang mengetahui secara jelas dan bagaimana Program Kerja Kepala Desa tahun 2018 di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis data yang digunakan dalam Deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan metode Milles dan Hubberman dengan metode analisis data dengan model interkatif, yaitu dengan langkah-langkah mereduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.

Kata Kunci : Evaluasi Program Kerja

1. PENDAHULUAN

Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya pada tanggal 18 Desember 2013 pada sidang paripurna DPR RI menyetujui rancangan Undang-undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-undang Desa. Satu bulan kemudian tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Desa.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (3)).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang tentang Pemerintahan Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing (undang-undang nomor 23 tahun 2014 bab XI, pasal 206).

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang professional (undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, bab 1, pasal 2).

Berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan turunan dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah karena dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa

belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa tersebut baik kepala desa maupun kepala dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat.

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan. Dengan demikian kepala desa menjadi pemimpin informal (Suryaningrat, 1992:87).

Keberhasilan atau kegagalan program pembangunan desa sangat ditentukan oleh tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya, sejauh mana Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen berarti menjalankan kepemimpinan fungsi manajemen atau sebagai manajer dalam menjalankan fungsi manajemen. Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan oleh aparatur desa dengan jumlah 8 (delapan) orang yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aparatur desa terutama Kepala Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya selaku pemimpin yang dibantu para perangkat desa.

Selaku Kepala Desa haruslah mampu merancang Program Kerja Jangka Pendek (RPJPDes), Jangka Menengah (RPJMDes) dan Jangka Panjang desa (RPJMDes) yang telah disusun dari tahun 2018, Kepala Desa adalah sebagai pengonsep atau pengatur program kerja yang akan di rancang dan di programkan

kemudian dilaksanakan. Dari pengamatan awal penulis di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman, pemerintahan desa sudah membuat program kerja dengan baik yang di kerjakan oleh Sekretaris desa, Kaur Umum dengan bantuan Operator Desa sebagaimana yang dapat kita perhatikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Program kerja Pemerintahan Desa Seberang Pulau Busuk Inuman Tahun 2018

No	Program Kerja	Dana @Rp (Dalam Jutaan)	Sumber Dana	Pelaksanaan	
				Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Belanja Kades & Perangkat Desa		APBDes		
	a. Kesejahteraan Kades	36.000		√	
	b. Kesejahteraan Sekdes	28.800		√	
	c. Kesejahteraan Kaur Umum	21.600		√	
	d. Kesejahteraan Staf Desa	24.000		√	
	e. Tunjangan BPD (Ketua, wakil & Anggota)	59.040		√	
	f. Insentif RT/RW	7.200		√	
2	Tambahan Penghasilan		APBDes		
	Kades selaku PKPKD	6.000		√	
	Sekdes selaku PKPKD	3.600		√	
	Kaur Umum selaku Bendahara	3.600		√	
	Kesehatan Kades dan perangkat	1.440		√	
3	Belanja Barang dan Jasa		APBDes		
	a. Belanja ATK	2.500		√	
	b. Cetak dan penggandaan	2.000		√	
	c. Konsumsi Rapat	2.500		√	
	d. Penyusunan RPJM & RKP	4.000		√	
	e. Penyusunan APBDes & Perdes	5.000		√	
	f. Internet Desa	20.000		√	
4	Biaya perjalanan Dinas		APBDes		
	Perjalanan Dinas ke Kecamatan	4.000		√	
	Perjalanan Dinas ke Kabupaten	2.000		√	
	Perjalanan Dinas ke Provinsi	3.000			√
5	Pembangunan Desa		APBDes		
	Lembaga Pendidikan				
	Pembangunan Gedung TK	350.000		√	
	Beasiswa BKM dan Prestasi	30.000			√
	Bantuan Buku Siswa	15.000			√
	Bantuan Pakaian Seragam sekolah	50.000			√
	Perpustakaan Desa	150.000			√
6	Pelayanan Kesehatan		APBDes		
	Pembuatan Sumur Bor	32.000			√

	Peyuluhan Kesehatan	3.000		√	
	Fogging & PMT AS	27.500			√
	Transportasi sekolah	290.000			√
	Rumah Bidan Desa	250.000			√
	Gedung Posyandu	200.000		√	
	Pengobatan Gratis	25.000		√	
	Pengurusan Kartu BPJS	5.000		√	
7	Infrastruktur		APBDes		
	a. Pembuatan Jembatan	575.000		√	
	b. Pembuatan Jalan Seminisasi	312.000		√	
	c. Pembuatan Turap	132.000		√	
	d. Pembangunan Pos Ronda	30.000		√	
	e. Pembuatan Kantor Desa	50.000			√
8	Pertanian Umum		APBDes		
	Hand Tractor/Bajak	48.000		√	
	Pengadaan Sprayer (Semprot)	32.000			√
	Bantuan Bibit Unggul	314.000			√
	Bibit Palawija& Pupuk Subsidi	29.200			√
	Bantuan Obat Tanaman (bibit)	80.000			√
	Bibit Tanaman Pekarangan	1.000			√
	Modal Simpan Pinjam UED-SP	500.000		√	
	Pembangunan BUMDES	10.000			√
	Pembangunan Pasar Desa/Psr buah	450.000			√
	Koperasi Desa	100.000			√
9	Total Dana Desa Seluruhnya	4.326.980		29	18

Sumber : RKP Desa Seberang Pulau Busuk Inuman Tahun 2018

Dari 8 item program yang disusun sangatlah baik, namun nampaknya program kerja yang telah disusun tersebut belum mampu dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dari tabel diatas di jelaskan bahwa :

1. Dari 8 program kerja yang ada hanya 4 program yang terlaksana dengan baik yaitu Belanja Kades dan Perangkat Desa, Tambahan Penghasilan, Belanja Barang dan Jasa serta Biaya Perjalanan Dinas
2. Pada program biaya perjalanan Dinas, untuk perjalanan Dinas ke Provinsi juga belum terlaksana.
3. Pada Program infrastruktur, Pembuatan Jembatan Pembuatan Jalan Seminisasi Pembuatan Turap dan Pembangunan Pos Ronda sudah terlaksana dengan baik, namun khusus proram pembuatan Kntor Kepala Desa belum terlaksana
4. Pada Program pelayanan Kesehatan hanya penyuluhan kesehatan, gedung Posyandu, Pengobatan Gratis dan Pengurusan Kartu BPJS yang terlaksana sementara 4 program lainnya belum terlaksana.

5. Sementara pada program Pertanian Umum, hanya pembelaian *Hand Tractor* Bajak dan Modal Simpan Pinjam UED-SP yang terlaksana sementara untuk Pengadaan Sprayer (Semprot), Bantuan Bibit Unggul, Bibit Palawija & Pupuk Subsidi, Bantuan Obat Tanaman (BOT), Bibit Tanaman Pekarangan, Pembangunan BUMDES, Pembangunan Pasar Desa/Pasar buah dan Koperasi Desa belum terlaksana.

Tentu dalam hal ini perlu ada evaluasi segala kendala atau penyebab tidak terlaksananya program kerja Pemerintahan desa tersebut, apakah karena kelalaian perangkat desa, kekurangan SDM atau kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh dengan judul : Evaluasi Program Kerja Pemerintahan Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Menurut (Nicholas Henry, 2007:21) Administrasi Negara ialah : Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi public berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

2.1.2 Teori Administrasi Desa

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa. Administrasi Desa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri akan tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Berdasar kepada diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 32 Tahun 2006.

2.1.3 Teori Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok, atau suatu kegiatan. Sebagai penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan gabungan dari keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

2.1.4 Teori Pembangunan

Pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

2.1.5 Teori Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata carapemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satuaktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto Hetifa Sj, 2003:1-2)

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

2.1.6 Teori Kebijakan

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Dye (dalam Abidin, 2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai “pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan. Easton (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

2.1.7 Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010:64) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

2.1.8 Teori Kepala Desa

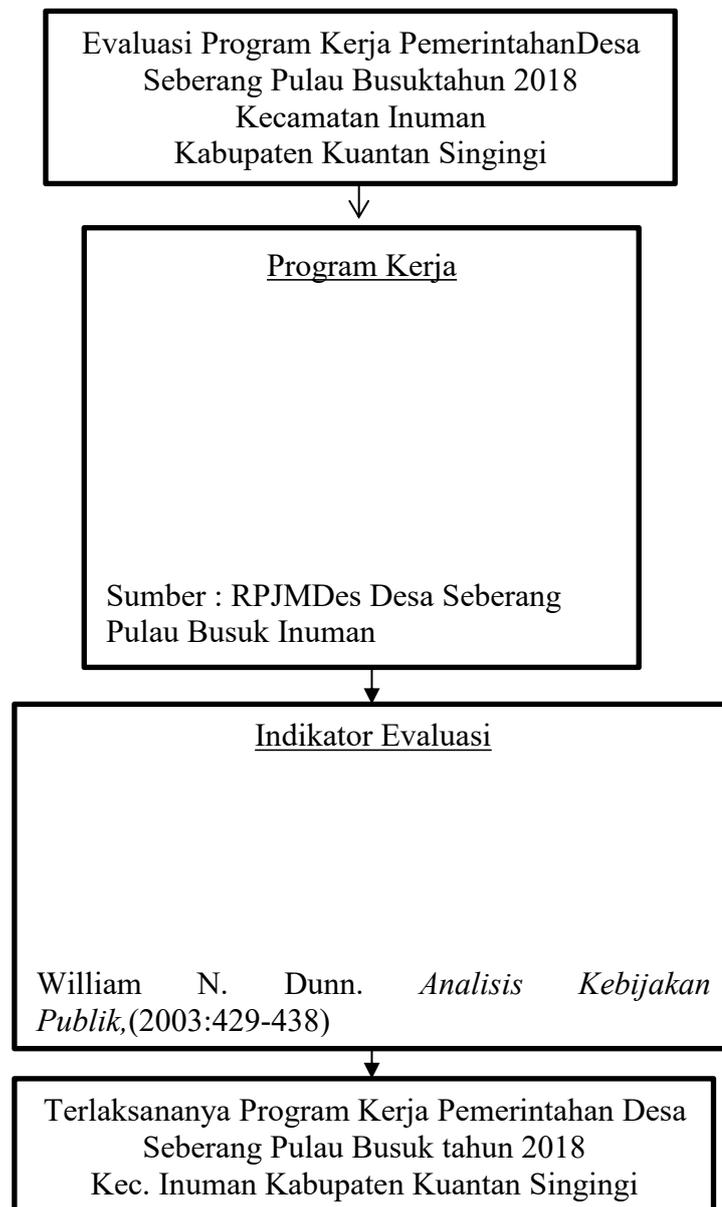
Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaanya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Menurut Widjaja (2006:78) dalam bukunya “otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh” menyatakan bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Menurut Robins, bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi, atau kelompok tertentu (Widjaja, 2006:79).

2.1.9 Program Kerja

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pengurus organisasi. Program kerja dalam organisasi karang taruna adalah kewajiban pengurus yang nantinya akan dijalankan oleh organisasi dalam jangka waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 *Hipotesis*

Hipotesis dalam Skripsi ini adalah Program Kerja Pemerintahan Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 belum terlaksana dengan baik.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004:27) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

3.2 Informan

Informan adalah sampel yang diwawancarai oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi akurat tentang evaluasi program kerja Pemerintahan Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingitahun 2018, informan tersebut dapat kita perhatikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa	1	5,55%
2	Sekretaris Desa	1	5,55%
3	Kepala Urusan (Kaur)	3	16,66%
4	Kepala Dusun	3	16,66%
5	Warga Masyarakat	10	55,58%
Jumlah		18	100

Sumber : Modifikasi penelitian tahun 2019

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis memperoleh data yaitu dari :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa informasi mengenai evaluasi program kerja Pemerintahan Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingitahun 2018 .
2. Data sekunder, adalah data yang penulis peroleh dari pihak instansi berupa laporan dan catatan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

- 1) Data-data tentang rincian Program Kerja Pemerintahan Desa dan pelaksanaan program kerja yang telah ada pada catatan rapat Desa;
- 2) Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- 3) Data-data lainnya yang diperoleh dari, BPS, Kecamatan, Desa dan instansi lain yang terkait

3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada evaluasi program kerja Pemerintahan Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingitahun 2018.

3.5 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memilih lokasi ini karena program kerja Pemerintahan Desa tahun 2018 belum terlaksana dan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga memerlukan pengkajian yang lebih mendalam tentang sebab dan faktor penghambatnya.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan), yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian yaitu di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian yakni kondisi geografis lokasi penelitian.
2. Wawancara (interview), yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas. Dengan penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan (dalam hal ini para anggota aparat desa) para informan yang digunakan adalah informan yang benar-benar mengetahui situasi, kondisi dan program serta hasil pembangunan desa, disamping itu pula informan tersebut juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program kerja kepala desa.
3. Dokumentasi, teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai bagaimana kondisi desa Seberang Pulau Busuk, struktur organisasi, jumlah masyarakat, program pembangunan desa profil desa. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008: 246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Milles dan Hubberman dalam Sugiyono (2008: 246), mengungkapkan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dengan model interkatif, yaitu meliputi langkah-langkah berikut: reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi (Miles dan Hubberman, 1992: 16-20) :

3.7.1 *Reduksi Data*

Merupakan proses penelitian, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data ini data-data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian akan diorganisir ke dalam sebuah “matriks analisis data”, yang meliputi unsur-unsur fokus penelitian, substansi data, katagori data, dan *meaning* (pemaknaan).

3.7.2. *Penyajian Data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. yang merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dimana data-data yang telah terorganisir ke dalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif.

3.7.3. *Penarikan Kesimpulan*

Merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data empiris hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang disusun dalam bab tinjauan pustaka usul penelitian ini, ataupun teori-teori lain yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan ditemukan kemudian. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama pengumpulan data, peneliti menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yakni dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya, yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif dan melibatkan interpretasi sendiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Tanggapan Informan tentang Efektivitas (effectiveness)*

Efektivitas (*effectiveness*) adalah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang diwujudkan berupa mengumpulkan usulan pembangunan desa dalam Musrenbang Desa yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk RAPBDes yang telah disusun secara bersama oleh pemerintahan Desa Seberang Pulau Busuk Inuman.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum dan Kaur Pembangunan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa gaji atau kesejahteraan melalui anggaran belanja kepala desa dan perangkat desa sudah cukup memadai dan sudah mampu menunjang perekonomian atau biaya hidup mereka sebagai aparat pemerintahan desa. Oleh

karena mereka sudah di gaji negara maka mereka harus mengabdikan diri sebagai pelayan rakyat dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Sebagaimana hasil observasi penulis dilapangan bahwa anggaran belanja kepala desa dan perangkat desa ditambah pula dengan tunjangan kinerja bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa sudah cukup memadai dan dikategorikan sudah lebih dari cukup dianggarkan oleh pemerintah, hanya tinggal menanti kesungguhan dan keseriusan serta kinerja Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengabdikan diri dalam membangun desa serta melayani seluruh keperluan masyarakat karena harus disadari bahwa mereka di gaji adalah untuk melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan sesuai anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. Sehingga sebagai aparat pemerintahan desa mereka harus mengutamakan profesinya ketimbang urusan pribadi dan urusan lainnya dan berhasil membangun desa dengan baik.

4.2 Tanggapan Informan tentang Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi adalah satu hal yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, yaitu mengadakan perengkingan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, hal ini harus dilakukan oleh pemerintahan desa dalam menentukan pembangunan jenis apa yang dibutuhkan atau dikehendaki oleh warga masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang Desa atau rapat RAPBDes yang didalamnya akan di himpun usulan-usulan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan tokoh masyarakat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dengan dibangunnya infrastruktur kesehatan, pertanian, pendidikan dan infrastruktur lainnya memang belum dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, tetapi pembangunan infrastruktur tersebut sudah membawa perubahan dan serta dirasakan manfaatnya dan sudah tepat sasaran, karena sangat terasa perubahan setelah adanya pembangunan berbagai infrastruktur oleh pemerintahan desa tersebut.

Dari hasil observasi yang telah peneliti laksanakan dilapangan memang secara kuantitas jumlahnya belum mencukupi seluruh sisi kehidupan masyarakat, tetapi setidaknya apa yang dibangun sudah sesuai dengan usulan dan kepentingan masyarakat dan sudah dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat, dengan sendirinya apa yang dibangun tentu sudah tepat sasaran karena memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Seberang Pulau Busuk Inuman dalam kehidupan sehari-hari.

4.3 Tanggapan Informan tentang Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan adalah hal yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, yaitu membangun sesuai dengan anggaran dana yang tersedia sehingga dapat dialokasikan dengan maksimal.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun I dan Dusun II serta tokoh masyarakat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa pembangunan infrastruktur atau program penyuluhan kesehatan, pembangunan gedung posyandu, pengobatan gratis dan pengurusan kartus BPJS sudah mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar warga masyarakat. Pembangunan berbagai

bidang infrastruktur tidak menimbulkan masalah baru tetapi justru menambah berkah dan memberikan keuntungan.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan, meskipun pembangunan infrastruktur belum secara keseluruhan, tetapi setidaknya dengan adanya program tersebut membuat masyarakat miskin sudah dengan mudah berobat gratis dan tidak perlu lagi membayar mahal seperti sebelum memiliki kartu BPJS, dengan adanya penyuluhan kesehatan membuat masyarakat lebih memahami akan pentingnya hidup sehat dan menghargai kesehatan, kemudian dibangunnya pos ronda lebih menjamin keamanan desa, dan dari pembangunan infrastruktur tersebut tidak ada menimbulkan masalah baru dilingkungan masyarakat desa Seberang Pulau Busuk, tetapi justru menguntungkan dan sangat membantu.

4.4 Tanggapan Informan tentang Kesamaan (*equity*)

Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dan tidak langsung dalam pembangunan desa, seperti memberikan usulan pembangunan infrastruktur, gotong royong bahkan langsung menjadi pekerja dalam pembangunan prasarana khususnya di desa Seberang Pulau Busuk.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa dan tiga orang warga masyarakat tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dengan membangun berbagai infrastruktur belum mampu memajukan berbagai usaha kelompok atau perorangan secara signifikan, dan dengan adanya program Simpan Pinjam UEP-SP belum cukup membantu kepada masyarakat pada usaha untuk penambahan modal dalam mendirikan usaha yang kreatif sebagai pendukung perekonomian keluarga.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan, justru polemik baru muncul dikarenakan dana yang dipinjamkan pemerintah seharusnya untuk modal usaha tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tetapi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat dari semua itu mereka sulit untuk melunasi pinjaman tersebut, akibat yang lebih fatal adalah dana UEP-SP yang seharusnya digulirkan tidak bisa dimanfaatkan karena kredit macet yang begitu besar akibat dari salah pemanfaatan alokasi dana. Hal ini terjadi karena tingkat perekonomian masyarakat yang rendah dan hidup dalam kemiskinan dan kurang ilmu pengetahuan sehingga dana seharusnya membantu justru menjadi beban karena salah pemanfaatannya.

4.5 Tanggapan Informan tentang Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu, masyarakat memberikan penilaian bahwa pembangunan sudah tepat sasaran atau tidak, begitu juga yang terjadi di desa Seberang Pulau Busuk Inuman dimana masyarakat memberikan penilaian terhadap keberhasilan program pemerintahan desa dalam membangun desa.

Dari hasil wawancara dengan pemerintahan desa dan tiga orang warga masyarakat diatas dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa reaksi masyarakat terhadap program-program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan

desa sangat positif dan mereka memang menantikan pembangunan berbagai infrastruktur karena program tersebut merupakan usulan masyarakat ketika diadakan rapat desa.

Sebagaimana hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut telah memiliki nilai dan manfaat terhadap masyarakat meskipun tidak secara keseluruhan, masyarakat juga menyambut dengan antusias dimana mereka secara sukarela membantu gotong royong dalam pembangunan infrastruktur tersebut, karena mereka sadar dapat membantu perekonomian mereka sebagai rakyat miskin, khusus warga masyarakat yang ekonominya mapan tentu saja tidak akan diberikan BPJS dan dana UEP-SP karena hal tersebut lebih diutamakan masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat miskin, sehingga bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran.

4.6 Tanggapan Informan tentang Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas *substantive*, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan, hasil pembangunan desa sudah dapat dirasakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat, jika hal ini belum dirasakan manfaatnya berarti pembangunan telah dianggap gagal dan belum terlaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan tiga orang warga masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan, pertanian, pendidikan dan infrastruktur jalan desa sudah dirasakan memang sudah tepat sasaran mengingat desa ini selalu dilanda banjir dan sulit dilewati kalau tidak segera dibuat jalan seminisasi, namun demikian program tersebut memang masih memerlukan evaluasi kembali baik ukuran ketebalan jalan maupun kombinasi bahan tahan banjir yang harus ditemukan formula yang tepat untuk hal itu.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan dilapangan, dengan adanya berbagai program pembangunan infrastruktur tersebut memang telah dapat dikategorikan telah sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Memang dalam pembangunan infrastruktur tersebut masih memerlukan evaluasi untuk lebih sempurna dimasa yang akan datang demi terwujudnya pembangunan masyarakat di desa Seberang Pulau Busuk Inuman tersebut.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat peneliti simpulkan bahwa program kerja Pemerintahan Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingitahun 2018 sudah tepat sasaran dan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak, namun demikian masih perlu ditingkatkan pada infrastruktur lain yang juga tak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Seberang Pulau Busuk Inuman dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program kerja pemerintahan desa sangat dibutuhkan demi keterlaksanaan pembangunan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)
2. Bapak Zul Ammar, S.E, MEdselakuDekan Fakultas Ilmu Sosialbeserta seluruh stafnya yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Desriadi, S.Sos, M.SiSelaku Ketua Program Studi Administrasi Negara beserta seluruh stafnya
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos, M.Si selaku pembimbing Iyang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Sahri Muharram, S.Sos, M.Si selaku pembimbing Iyang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan Skripsi.
6. Seluruh staff pengajar, Bapak /Ibu Diosen berserta karyawan/TI Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) khususnya Fakultas Ilmu Sosial.
7. Bapak Agus Purnama selaku Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa, BPD dan masyarakat Seberang Pulau Busuk Inuman Kecamatan Inuman yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Ramsi dan ibunda Maranis yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing serta membiayai seluruh kebutuhan penulis sampai saat ini.
9. Saudaraku Putri Yani Astuti, A.Md. Kep yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh Keluarga Besar yang telah ikut membantu penulis berupa materi maupun immateri selama perkuliahan berlangsung.
11. Kepada rekan-rekan yang seperjuangan Prodi Administrasi Negara yang telah turut memberikan motivasi kepada Penulisdan seluruh orang yang telah berjasa dan turut serta dalam membantu penyelesaian perkualiahan ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmadi, Adib. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
Jakarta: Rineka Cipta

Bambang T. Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Fokus Media

Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Beni Setiawan (1999). *Evaluasi Program Kerja*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Dunn, William N. (2003) *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Gadjah Mada University Press

Dede Rosyada Dkk, (2000) *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah

Hanif Nurcholish, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga

Imam Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

Ishak, Arep, Henri Tanjung. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana.

Istianto, Bambang. (2009). *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1996). Jakarta: Gramedia.

Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Miles, B.B., dan A.M. Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. UI: Press Jakarta.

Sarlito Sarwono. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Silalahi, Ulbert, (2002). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algensindo: Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2011. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. (2006). *Evaluasi Program*, Jakarta: Rhinneka Cipta.
- Sumardjono, Dardjo, Junuzal Junus. (1990/1991). *Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa & Kelurahan*. Jakarta: PT. Union Cipta Muda.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarto Hetifa. Sj, (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryaningrat, Bayu. (1992). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryadiningrat, Bayu. (1992). *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*, Fakultas Ekonomi UI : Jakarta
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno Surachman. 1995. *Pengantar Peneltian Ilmiah*. Bandung : Tarsito

B. Undang-undang

Pemerintah Desa & Kelurahan. Jakarta: PT. Union Cipta Muda.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa